



## ANTISIPASI DIUSUT KEJAKSAAN Tim Deteksi Dini Perusahaan Semakin Digencarkan

**YOGYA (KR)** - Tim deteksi dini perusahaan yang dibentuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta kini semakin digencarkan mendatangi tiap perusahaan. Langkah ini ditempuh guna mengoptimalkan pembinaan perusahaan memperhatikan setiap hak pekerja sesuai amanat undang-undang.

Menurut Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Hadi Muhtar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kini udah menjalin kerja sama dengan kejaksaan dalam menindak perusahaan nakal. "Kami antisipasi agar jangan ada perusahaan di Kota Yogya ini yang sampai diusut kejaksaan. Makanya tim deteksi dini kini semakin gencar ke lapangan," ujarnya, Minggu (22/5).

serta menambah frekuensi kunjungan. "Sudah sebulan ini, tim deteksi turun ke lapangan lebih dari satu kali dalam seminggu. Jadi tidak lagi tiap Selasa. Perusahaan pun tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu di-datangi petugas. Kami hanya ingin meyakinkan jika mekanisme di perusahaan tersebut sesuai dengan undang-undang tenaga kerja," paparnya.

Oleh karena itu, beberapa persoalan yang digali tiap kali mengunjungi perusahaan ialah seputar hak pegawai. Mulai dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sistem honor yang harus menyesuaikan Upah Minimum Kota (UMK), penerapan struktur skala upah bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun hingga rencana pembe-

Tim yang berisi petugas pengawas hubungan industrial tersebut memiliki jadwal rutin datangi perusahaan tiap Selasa. Satu kali kunjungan, minimal bisa menjangkau hingga empat perusahaan. Namun lantaran jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta yang mencapai ribuan, maka kunjungan pun dioptimalkan.

Optimalisasi tersebut dengan memperbanyak jangkauan kunjungan hingga dua kali lipat dari rutinitas.

rian Tunjangan Hari Raya (THR). Apalagi saat ini sudah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 dan 7 Tahun 2016 terkait mekanisme pembayaran THR dan uang servis bagi pekerja di sektor perhotelan dan restoran.

Hadi Muhtar menambahkan, dari laporan tim deteksi dini tersebut, pihaknya pun bisa mengetahui secara detail tiap persoalan. Sehingga ketika tercium ada potensi gejala di setiap perusahaan, maka mediator dari unsur pemerintah bisa langsung turun tangan. "Intinya jangan sampai pengusaha itu menekan pekerja, begitu pun sebaliknya pekerja jangan mengakali pengusaha. Semua, harus bersinergi, tentunya hak pekerja harus diberikan oleh pengusaha secara terbuka," tandasnya. **(Dhi-k**

| Instansi                                       | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Positif      | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 15 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005